

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan usaha kesejahteraan masyarakat yang dilakukan pemerintah berupa bantuan-bantuan yang dilaksanakan untuk tingkat lokal, nasional maupun global demi terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar secara layak tidak akan terlepas dari peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 1, Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan hak lansia yang sama dengan setiap warga negara indonesia. Mempunyai fisik yang sudah tidak sekuat orang-orang yang masih muda membuat lansia perlu diperhtikan kesejahteraannya. Hak yang sama diberikan untuk lanjut usia dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan sosial nya untuk dirinya sebagai tanda penghormatan dari pemerintah.

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila.

Menurut PP Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Pasal 1, yang dimaksud peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diupayakan dengan beberapa kegiatan yang di implementasikan dengan cara yang terarah dan koordinasi yang baik oleh pemerintah dengan masyarakat bertujuan untuk memajukan lanjut usia atau memperbaiki tingkat sosial lansia bertujuan agar lansia tetap bisa melakukan aktifitas dengan tubuhnya untuk melakukan perannya di masyarakat sekitar berbangsa maupun bernegara. Disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 5, Lanjut usia memiliki hak:

- (1) Lanjut Usia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual
 - b. pelayanan kesehatan
 - c. pelayanan kesempatan kerja
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan
 - e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum.
 - f. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
 - g. Perlindungan sosial
 - h. Bantuan sosial

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pasal 2 juga menyebutkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diselenggarakan berdasarkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu lansia sangat perlu di perhatikan kesejahteraannya untuk menunjang kehidupan sehari hari agar dalam menjalani masa tuanya lansia tetap bisa produktif dalam segala hal. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggolongkan lanjut usia menjadi 4 yaitu: (Nurmawati, Skripsi, 2016:48).

Tabel 1.1

Golongan Lanjut Usia Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

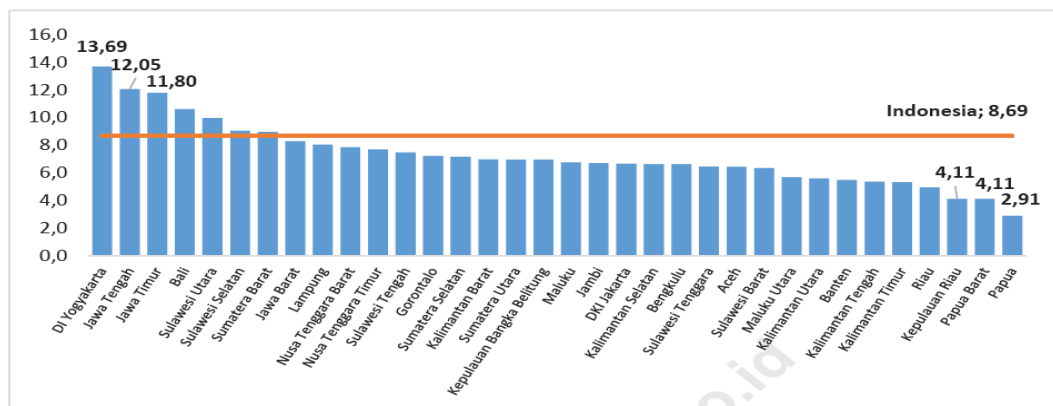
kategori lansia	Umur
Young Old	60-69 tahun
Old	70-79 tahun ke atas
Old Old	80-89 tahun ke atas
Very old	Diatas 90 tahun

Lanjut usia bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lanjut usia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologi. Kegagalan ini berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara individual. Pengaruh proses menua dapat menimbulkan berbagai masalah, baik secara biologis mental maupun ekonomi. Semakin lanjut usia seseorang, maka kemampuan fisiknya akan semakin menurun sehingga dapat mengakibatkan kemunduran pada peran-peran sosialnya (Ferry (2009:92).

Selanjutnya pemerintah mencatat Yogyakarta merupakan kota yang memiliki jumlah penduduk lanjut usia tertinggi di Indonesia.

(<https://www.merdeka.com/uang/jumlah-penduduk-lansia-di-yogyakarta-tertinggi-di-indonesia.html>, akses tanggal 18 september 2017).

Gambar 1.1 Persentase Lansia Menurut Provinsi Tahun 2016



Sumber: BPS, Susenas 2016

Memperlihatkan presentase lansia menurut provinsi, dimana lansia terbesar terdapat di Provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar 13,69% disusul Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 12,05%. Dan Provinsi Jawa Timur sebesar 11,80%. Besar nya presentase ini perlu menjadi perhatian tersendiri mengingat di satu sisi semakin meningkatnya lansia berarti kualitas hidup semakin baik seiring semakin baiknya akses untuk mendapatkan fasilitas kesehatan sehingga usia harapan hidup meningkat. Namun disisi lain lansia menghadapi perubahan dalam hidupnya, yaitu kemunduran kondisi kesehatan fisik dan psikis yang dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonominya, sehingga secara perlahan akan mengalami ketergantungan kepada orang lain. Sedangkan provinsi dengan presentase lansia terendah yaitu berturut-turut terdapat di Provinsi Kepulauan Riau 4,11%, Papua Barat 4,11% dan Papua 2,91%.

Tabel 1.2

Jumlah Lansia Terlntar di DIY

Kabupaten	Tahun	Jumlah
Bantul	2015	6.083 jiwa
	2016	8.025 jiwa
Sleman	2015	5.536 jiwa
	2016	6.017 jiwa
Kulonprogo	2015	4.918 jiwa
	2016	5.432 jiwa

Selanjutnya pada tahun 2015 jumlah lansia terlantar di Bantul yang merupakan salah satu kabupaten di DIY yakni sebanyak 6.083 jiwa dan pada tahun 2016 sebanyak 8.025 jiwa. Jumlah lansia terlantar di Kabupaten Sleman sebanyak 5.536 jiwa pada tahun 2015 sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 6.017 jiwa. Selanjutnya di Kabupaten Kulon Progo lansia terlantar tahun 2015 sebanyak 4.918 jiwa dan pada tahun 2016 sebanyak 5.432 jiwa.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/02/23/mioild-lansia-terlantar-di-diy-meningkat-1679-persen> di akses 30 Agustus 2017

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selaku daerah yang memiliki angka harapan hidup paling tinggi di Indonesia mengantisipasi tingginya jumlah lansia dengan menerapkan beberapa program pelayanan sosial lansia. Program pelayanan sosial lansia yang diberikan merupakan bentuk jaminan sosial yang bisa diakses oleh orang yang membutuhkan. Program yang dilakukan tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah namun juga membutuhkan kerjasama dari semua pihak baik swasta, lingkungan maupun keluarga sehingga akan terwujud jaminan sosial yang menghargai pada local wisdom. Untuk meningkatkan kesejahteraan para lansia, Pemerintah Provinsi DIY melalui Dinas Sosial telah melakukan program untuk lanjut usia potensial maupun yang tidak potensial, khususnya yang mengalami keterlantaran dan kekerasan (Sibbil, Skripsi, 2004:11).

Mengacu pada program pelayanan sosial lanjut usia Kementerian Sosial RI, berbagai macam program atau kegiatan di bidang pelayanan sosial lanjut usia baik memamui dana APBD maupun APBN yang selama ini telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi DIY telah melakukan beberapa kegiatan antara lain:

1. Jaminan Sosial Lanjut Usia
2. Bantuan pemakaman bagi lanjut usia terlantar
3. Bimbingan soaial usaha ekonomi produktif
4. Fasilitas pelayanan lanjut usia melalui homecare
5. Pendampingan lanjut usia korban erupsi merapi
6. Pelaksanaan KIE dan kampanye sosial dalam rangka hari lanjut usia nasional.

Selain itu Dinas Sosial Provinsi DIY juga menyelenggarakan pelayanan soaial bagi lanjut usia melalui Panti Sosian Tresna Werdha yang terdiri dari 2 unit yaitu Unit Abiyasa Pakem Sleman dan Unit Budhi Luhur Kasongan Bangunjiwo Kasihan Bantul. Kultur yang tumbuh di masyarakat indonesia menyebabkan partisipasi lansia terhadap panti jompo masih terbilang rendah. Jumlah klien Pasti Soalia Tersna Werdha (PSTW) dari sekian banyak lansia yang ada di DIY yang dilayani pada tahun 2013 sebanyak 214 orang penghuni.

Bantul adalah salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberi pelayanan soaial lansia secara mandiri. Artinya selain adanya pelayanan sosial dari Dinas Sosial DIY Pemerintah

Kabupaten Bantul juga memberikan pelayanan sosial kepada lansia diwilayahnya. Program pelayanan soaial yang diberikan tidak berbeda jauh dengan pelayanan sosial Dinsos DIY. Dalam program tersebut terbagi menjadi tiga yaitu untuk lansia produktif dan lansia tidak produktif serta untuk lansia terlantar. Masing- masing tersebut mempunyai perbedan.

1. Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) yang memberi bantuan kepada lansia terlantar tidak potensial dalam bentuk uang tunai Rp. 200.000,00 setiap bulan bisa dibilang ini adalah bantuan secara ekonomi.jumlah penerima ASLUT pada tahun 2011-2012 berjumlah 340 orang.

2. Pemberdayaan lansia yaitu program untuk lansia potensial dengan memberikan pelatihan keterampilan dan memberi bantuan modal.

Berdasarkan paparan tersebut peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Kinerja Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Program Kesejahteraan Lansia.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Kinerja Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Program Kesejahteraan Lansia Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Kinerja Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Program Kesejahteraan Lanjut Usia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut penulis paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan perkembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan Kinerja Dinas dalam pelaksanaan program meningkatkan kesejahteraan lansia. Selain hal itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bersifat praktis, adapun manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi

kepada Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kinerja untuk kesejahteraan lansia.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk memperkuat teori ini, maka peneliti terlebih dulu melakukan pemetaan terhadap peneliti-peneliti terdahulu yang sudah melakukan penelitian yang serupa. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai gambaran riset penelitian pada tahun 2016:

Tabel 1.3.
Tinjauan Pustaka

NO	JUDUL	ISI
1.	Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar Dalam Memperoleh Pelayanan Publik Oleh Aldila Dharma Wijaya.	Pada dasarnya penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pada perlindungan hukum bagi seorang lanjut usia yang hidupnya terlantar dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 9 dan 10 lanjut usia yang seharusnya mendapatkan pelayanan panti werdha belum terlaksanakan. karena satu belum diperkuatnya perda dan perbup kabupaten kediri tentang pemenuhan jaminan sosial.

2.	Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Lanjut Usia di Kabupaten Sidoarjo Oleh Ramadhani Bondan Puspitasari	Faktor penghambatnya program belum terkoordinir dengan baik antara tiga SKPD. Kurang valid pendataan sekabupaten Sidoarjo rentang lansia terlantar sehingga tidak terdata dari masing-masing desa atau kelurahan. Dan juga kurang kesadaran lansia akan pentingnya pemberdayaan untuk kehidupan mereka.
3.	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Frekuensi Kehadiran Lanjut Usia di Posyandu Lansia Oleh Herdini Widyaning Pertiwi	Semakin tinggi dukungan keluarga maka semakin aktif frekuensi kehadiran lanjut usia ke posyandu lansia, Semakin tinggi pengetahuan, pendidikan dan dukungan keluarga maka semakin aktif frekuensi kehadiran lanjut usia ke posyandu lansia
4.	Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Terkait Implementasi Program Pembinaan Lansia Potensial Tahun 2010-2011 Oleh Sahril Abdullah Yusuf	Hasil penelitian menunjukkan tidak jauh berbedanya pembinaan yang dilakukan di luar panti atau di dalam panti yang menjadi perbedaan adalah kelengkapan kegiatan serta fasilitas yang dimiliki di dalam panti.
5.	Upaya Peningkatan Pelayanan Sosial Bagi Lansia Melalui <i>Home Care Service</i> di Panti Sosial Tresna Wredha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Oleh Nuraeni Setyaningrum	Upaya peningkatan sosial bagi lanjut usia melalui <i>home care service</i> yang diselenggarakan oleh PSTW Yogyakarta unit Budhi Luhur adalah dengan memberikan saranan kebutuhan pokok, memberikan saranan kesehatan, memberikan sarana spiritual/rohani, memberikan sarana bimbingan psikologi.
6.	Problem Keberfungsian Sosial di Panti Wredha Budi Dharma	Dalam menangani problem keberfungsian sosial lansia di

	Yogyakarta Oleh Hikmah Jariatun	panti, peksos telah melakukan berbagai upaya, diantaranya: pertama, pelatihan skill lansia dengan berbagai kegiatan yang ada di panti seperti kegiatan keterampilan, kegiatan musik, senam lansia. Kedua, motivasi melalui bimbingan penguatan mental spiritual dan pengajian. Ketiga pendampingan dengan lansia, yaitu memonitoring tindakan yang dilakukan oleh lansia. Keempat, kerjasama dengan keluarga lansia ketika lansia sedang mengalami permasalahan dengan keluarganya.
7.	Hubungan Pengetahuan Aktivitas Dasar Sehari-hari (ADS) Dengan Perilaku Sehat Lansia di Panti Sosial Tersna Werdha Yogyakarta Unit Budi Luhur Oleh Saman, Tri Prabowo, Purwanto.	Kesimpulannya bahwa Keterbatasan akibat proses menua dan kurangnya pengetahuan secara umum dan pengetahuan aktivitas dasar sehari-hari (ADS) secara khusus akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan aktivitas dasar sehari-hari itu sendiri.
8.	Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakaktifan Lanjut Usia Ke Posyandu di Puskesmas Cebongan Salatiga Oleh Sri rahayu, Purawanta, Dwi Harjanto.	Kesimpulannya bahwa, Pemerintah telah mengantisipasi adanya penambahan jumlah kelompok lanjut usia dengan mengadakan Pos Layanan Terpadu (Posyandu) lanjut usia yang dibina oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar diberbagai wilayah Indonesia.
9.	Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Depresi Pada Lanjut Usia Yang Tinggal di Panti Werdha Wening Wardoyo	Dukungan sosial yang berasal dari keluarga, karena berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara,

	Jawa Tengah Oleh Meta Amalia Widya Saputri, Endang Sri Indrawati.	dukungan sosial yang diberikan oleh pihak panti sudah cukup baik. Dilihat dari suasana panti yang tenang, bersih dan bentuk bangunan panti yang berupa wisma-wisma, panti wredha yang berada di bawah naungan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah termasuk panti werdha yang memperhatikan kenyamanan penghuninya.
10.	Peran Pendamping Spiritual Terhadap Motivasi Kesembuhan Pasien Lanjut Usia Oleh Karina Dinda Kinasih, Aries Wahyuningsih	Keseimbangan fisik bagi lanjut usia berkaitan dengan pemulihan pribadi lanjut usia. Kesembuhan berarti hilangnya penyakit dari tubuh lanjut usia dengan pemulihan berarti mengembalikan pribadi lanjut usia ke dalam keadaan sehat. Dalam menangani penyakit kronis yang kemungkinan untuk sembuh sangat kecil, dokter dan perawat perlu bekerja sama dengan petugas rohani untuk menolong pasien lanjut usia merasa tidak begitu sakit.

Dari penelitian diatas, penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang Kinerja Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul dalam program Kesejahteraan Lansia Tahun 2016, yang lebih fokus pada bagaimana Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia.

F. Kerangka Teori

1. Organisasi Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Organisasi Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di pasal 5 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas
- e. Badan
- f. Kecamatan

Kemudian pada Pasal 2 menyebutkan Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Intensitas urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

- c. Efisiensi
- d. Efektivitas
- e. Pembagian habis tugas
- f. Rentang kendali
- g. Tata kerja yang jelas dan
- h. Fleksibilitas

Pelayanan publik bagi lanjut usia merupakan pelayanan soial yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah, seperti yang terdapat dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah tersebut mengatakan bahwa Urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

- a. pendidikan
- b. kesehatan
- c. pekerjaan umum dan peraturan ruang
- d. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- e. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- f. Soial

Dari data diatas ada beberapa yang berkaitan dengan lansia yang pertama adalah kesehatan ketika kita berbicara tentang kesehatan, kesehatan sangat berhubungan erat dengan lansia karena yang disebut lansia adalah orang yang telah mencapai umur 60 tahun ke atas dan ketika seseorang semakin banyak umurnya semakin menurun energi yang

dimiliki semakin rentan juga terkena penyakit oleh karena itu lansia sangat membutuhkan jaminan kesehatan karena ketika seseorang semakin tua mereka sudah tidak dapat bekerja untuk mencari uang.

Dan yang kedua adalah ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lansia sangat membutuhkan hidup yang tentram diperhatikan oleh semua orang dimengerti semua orang karena lansia sangat membutuhkan lingkungan yang membuat nyaman membuat bahagia dalam menikmati masa tua nya dan juga lansia juga wajib dilindungi oleh semua orang karena lansia sudah tidak dapat melindungi diri nya sendiri karena daya tahan tubuh nya yang sudah rentan dan menurunnya fungsi tubuh.

Yang ketiga adalah sosial ketika seseorang sudah memasuki lansia mereka membutuhkan tempat tinggal yang layak untuk ditinggalai saat lansia yang masih memiliki keluarga mereka tinggal bersama anak dan cucu mereka serta saudara-saudara nya dan ketika lansia sudah tidak punya kerabat ataupun saudara lansia membutuhkan tempat tinggal yang layak seperti panti werdha untuk lansia tinggal dan mendapatkan perlakuan sosial yang layak.

2. Pengertian Kinerja

Kinerja (*performance*) dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau *the degree of accomplishment* atau dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi.

Semakin tinggi kinerja organisasi maka akan semakin tinggi pencapaian tujuan organisasi (Tangkilisan, 2003:31).

Sedangkan pendapat lain disampaikan Mahsum bahwa kinerja adalah suatu tingkatan pencapaian dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program dengan selalu mengedepankan sasaran, visi dan misi serta tujuan kinerja organisasi yang terdapat pada rencana strategis (*strategic planning*). Kata kinerja kerap diartikan sebagai suatu prestasi keberhasilan individu maupun kelompok individu dalam suatu program. Kinerja dikatakan berhasil jika individu maupun kelompok individu mempunyai kriteria yang telah di buat dengan acuan tujuan dan target tertentu (Mahsum, 2006:25).

Kinerja merupakan perwujudan dari hasil kerja seseorang yang pada gilirannya akan menentukan keseluruhan keberhasilan dari faktor-faktor yang berpengaruh dalam menentukan apakah seseorang bekerja lebih baik. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik (Basri dan Rifai, 2005:328).

Hasil kerja yang didapat oleh seseorang dengan capaian tertentu dengan bertanggung jawab dengan organisasi yang bersangkutan dan tidak melanggar hukum serta etika yang sesuai dalam rangka mencapai sebuah tujuan organisasi adalah pengertian hasil kinerja yang baik (Cardoson, 1997:7)

Kinerja adalah prestasi yang dapat dicapai seseorang atau organisasi berdasarkan kriteria dan alat ukur tertentu. Parameter yang

paling umum digunakan, menurut Drucker (1977) adalah efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Sedangkan menurut Hasibuan (1990) kinerja adalah prestasi yang ditunjukkan oleh karyawan. Ia merupakan hasil yang dapat dicapai dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya berdasarkan kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu yang tersedia (Hasibuan, 1990:41).

a. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah sesuatu yang di jadikan alat ukur kinerja atau hasil yang di capai. indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah di tetapkan. indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. indikator kinerja adalah suatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan. indikator kinerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai. Yang disebut dengan indikator kinerja sering diartikan volume kualitatif dan kuantitatif yang memperlihatkan seberapa besar yang telah dicapai dari sasaran dan tujuan organisasi

b. Pengukuran Kinerja

Menurut Dwiyanto, ada lima indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik (Eriek, 2013:78),

1. Produktivitas

Konsep produktifitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Pelayanan ini dimaksudkan dalam melaksanakan program dan untuk melaksanakan program tersebut diperlukan sebuah anggaran. Produktifitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktifitas selanjutnya mengalami pengembangan yang lebih luas lagi dengan berorientasi pada rasio. Konsep baru ini dikembangkan General Accounting Office (GAO).

2. Kualitas Layanan

Pembahasan mengenai pentingnya suatu kualitas pelayanan yang didukung dengan kinerja organisasi pelayanan publik. Beberapa pandangan yang kurang baik mengenai kualitas pelayanan organisasi publik kerap kali muncul akibat ketidakpuasan seseorang dalam mendapatkan suatu pelayanan publik oleh organisasi publik.

3. Responsivitas

Responsivitas adalah seberapa besar kemampuan organisasi publik dalam mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat serta memprioritaskan suatu hal serta pengembangan suatu program pelayanan publik yang disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

4. Responsibilitas

Responsibilitas adalah pengukuran pelaksanaan suatu program atau kegiatan oleh organisasi publik apakah berpedoman pada suatu prinsip administrasi yang baik atau pada kebijakan organisasi serta apakah sarana dan prasarana mendukung.

5. Akutabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Sebuah alat yang digunakan untuk mengukur sebuah kinerja dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dalam mengambil keputusan dan melihat seberapa akuntabel suatu program disebut pengukuran kinerja menurut Whittaker. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi atau serta meningkatkan kualitas pengambilan dan keputusan akuntabilitas (Hamsyah, 2011:75).

Kinerja atau prestasi yang didapatkan oleh suatu organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek Responsivitas

Aspek responsivitas adalah suatu kemampuan organisasi publik untuk selalu mengenali apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program layanan sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas adalah kemampuan organisasi publik dalam merespon permasalahan-permasalahan serta kebutuhan dan keinginan yang disampaikan melalui aspirasi masyarakat.

2. Aspek Responsibilitas

Menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik eksplisit maupun implisit.

3. Aspek Akuntabilitas (accountability)

Akuntabilitas dalam hal ini, ada beberapa konsep yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkatan suatu aturan atau kebijakan dalam kegiatan di suatu organisasi publik dalam mempertahankan keinginan masyarakat. Suatu kinerja tidak bisa hanya dilihat pada sisi dalamnya saja yang ditingkatkan oleh organisasi atau pemerintah tetapi harus melihat pada sisi target yang akan di capai. Akan tetapi kinerja juga dinilai dari sisi luarnya dengan berpedoman pada nilai dan norma yang sesuai perkembangan masyarakat. Dalam kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi jika kegiatan atau

program dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dan di yakini dalam masyarakat.

4. Aspek Produktivitas

Konsep produktifitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktifitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktifitas selanjutnya mengalami pengembangan yang lebih luas lagi dengan berorientasi pada rasio. Konsep baru ini dikembangkan General Accounting Office (GAO).

5. Aspek Profesionalisme

Aspek Profesionalisme menunjukkan sifat dari suatu pekerjaan yang membutuhkan kompetensi atau keahlian teknis. Profesionalisme menjadi suatu kebutuhan yang dibutuhkan yang sulit dihindari oleh suatu organisasi karena semakin banyaknya kompleksitas masalah yang timbul di masyarakat dan semakin modern pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang semakin canggih.

Kinerja dan prestasi yang diraih oleh suatu organisasi dapat dilihat dari berapa aspek (Ratminto dan Atik Winarsih, 2005:179).

1. Aspek Produktivitas (Productivity)

Produktivitas adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2. Aspek Kualitas Pelayanan (quality of service)

Aspek ini dapat dilihat sebagai aspek efektifitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi kepada para konsumennya.

3. Aspek Responsivitas (responsiveness)

Yang di maksud dengan responsivitas adalah kemampuan provider untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap providers terhadap harapan , keinginan dan aspirasi serta tuntutan customers.

4. Aspek Responsibilitas (responsibility)

Aspek ini adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintah dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

5. Aspek Profesionalisme (professionalism)

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, diperlukan adanya sumber daya manusia yang profesional . Hal ini berarti bahwa dalam menjalankan tugasnya, mereka harus

memiliki kapabilitas, berdisiplin pada pelaksanaan tugas, berorientasi pada hasil dan memiliki integritas yang tinggi dalam rangka mengemban visi dan misi organisasi. Aspek Profesionalisme, meliputi:

- a. Komitmen dan konsistensi (terhadap visi dan misi dan tujuan organisasi).
- b. Wewenang dan tanggung jawab.
- c. Integritas dan profesional.
- d. Disiplin dan keteraturan kerja.
- e. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

6. Aspek Akuntabilitas (accountability)

Aspek ini adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

7. Aspek Keterbukaan / transparansi

Yang dimaksud dengan keterbukaan atau transparansi adalah bahwa prosedur / tatacara, penyelenggaraan pemerintahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah di ketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

3. Lansia

Seseorang yang usianya sudah 60 tahun di sebut Lanjut Usia paparan tersebut berada dalam undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Terbagi menjadi dua yaitu lansia yang masih bisa bekerja atau memenuhi kebutuhannya sendiri dan lansia yang sudah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang masih bisa memenuhi kebutuhannya sendiri disebut lansia potensial dan yang sudah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri disebut lansia tidak potensial.

Selanjutnya penggolongan lansia menurut Direktorat Pengembangan Ketahanan Keluarga BKKBN, pada azasnya dapat dibedakan menjadi:

- a. Kelompok lansia awal (45-54 tahun) merupakan kelompok yang baru memasuki lansia.
- b. Kelompok pra lansia (55-59 tahun)
- c. Kelompok Lansia 60 tahun keatas

4. Kesejahteraan

Sejahtera atau kesejahteraan memiliki empat arti, yaitu:

- a. Dalam gambaran umum, sejahtera mengacu pada keadaan manusia yang baik, orang-orang dalam keadaan tercukupi, sehat serta damai.
- b. Dalam ekonomi sejahtera selalu dikaitkan dengan manfaat sebagai fungsi kesejahteraan.

- c. Dalam kebijakan sosial kesejahteraan sosial berpedoman pada seberapa jauh pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Istilah tersebut digunakan pada ide negara kesejahteraan.
- d. Pada negara maju seperti Amerika kesejahteraan mengacu pada keuangan yang pemerintah memberikannya kepada orang yang membutuhkan akan tetapi sudah tidak dapat bekerja.

Atau yang pendapatannya tidak sesuai dengan kebutuhan dasar tidak cukup atau tidak layak secara manusiawi atau jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan; atau bisa juga karena memiliki kondisi khusus, seperti adanya bukti sedang mencari pekerjaan (menganggur); atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban untuk menafkahi keluarga atau menjaga anak (yang mencegahnya untuk dapat/bisa bekerja), karena di beberapa kasus negara penerima dana diharuskan bekerja, yang dikenal dengan istilah *workfare*. Hal ini, tampaknya berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, kasus Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung Sementara Tunai (BLST) atau bentuk-bentuk bantuan lain yang lebih bersifat kedermawanan (*charity*), yakni tidak ada kewajiban atau keharusan bagi penerima untuk bekerja.

Menurut W.J.S Poerwadarminta (1990) kesejahteraan diartikan sebagai keadaan yang aman, sentosa dan makmur sehingga kata kesejahteraan dapat diartikan sebagai keamanan, keselamatan dan kemakmuran dan begitupun dengan istilah masyarakat atau rakyat

dalam artian sempit adalah berkaitan dengan sosial dan kesejahteraan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang paling utama adalah masyarakat yang belum beruntung atau kelompok orang miskin.

Dalam membangun kesejahteraan pada rakyat bersangkutan pada sebuah program atau layanan sosial untuk mengatasi sebuah masalah sosial seperti kemiskinan dan kenakalan remaja. Sebagai konsekwensinya, pengertian kebijakan kesejahteraan rakyat sering diartikan sebagai kegiatan amal atau bantuan untuk publik yang dilakukan pemerintah untuk keluarga miskin dan anak-anaknya. Para ilmuwan sosial menghubungkan “indeks pembangunan manusia “ yang artinya tingkatan hidup masyarakat yang dapat dilihat dari 3 indikator yang utama yang pertama adalah tingkat harapan hidup dan yang kedua adalah tingkat pendidikan serta yang ketiga adalah tingkat pendapatan (Agus Suryono, 2014:99).

5. Kesejahteraan Sosial Lansia

Pada peraturan pemerintah Republik Indonesia No 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia pada pasal 1 dijelaskan bahwa Kesejahteraan sosial adalah suatu kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diikuti oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman yang memberi harapan bagi setiap warga negara untuk dapat memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani serta kebutuhan

sosialnya dengan sebaik-baiknya untuk diri sendiri, keluarga serta masyarakat dengan selalu mengedepankan hak-hak asasi manusia. Dalam bukunya Isbandi Rukminto juga menjelaskan Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan secara ideal (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spiritual(Isbandi Rukmito, 2013:23).

Kesejahteraan sosial adalah sistem pelayanan pada institusi yang terorganisasi, yang bertujuan untuk membantu individu-individu serta kelompok-kelompok untuk mencapai standar kehidupan yang layak serta kesehatan serta hubungan sosial yang memuaskan yang bisa digunakan untuk mengembangkan kemampuan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yang sesuai dengan kebutuhan paparan diatas di kemukakan oleh Friedlander (Fahrudin, 2012:19).

Di negara indonesia, tujuan kesejahteraan dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang tujuan kesejahteraan sosial yakni:

1. Peningkatan taraf kesejahteraan hidup
2. Pemulihan fungsi sosial
3. Peningkatan ketahanan sosial
4. Peningkatan kemampuan serta kepedulian dan tanggung jawab
5. Peningkatan kemampuan dalam menyelenggarakan kesejahteraan
6. Peningkatan kualitas manajemen

Kesejahteraan sosial berkaitan dengan suatu tantangan kehidupan material maupun spiritual yang dapat memenuhi kebutuhan secara seimbang baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani dan kebutuhan sosial yang berfungsi sebagai penunjang kehidupan untuk diri sendiri maupun masyarakat dengan baik. Pada dasarnya kesejahteraan sosial lanjut usia mempunyai fungsi dalam menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial lanjut usia berikut ini penjelasan dari andi fahrudin (2012:11) yaitu: yang pertama adalah Fungsi pencegahan, kedua fungsi penyembuhan, yang ketiga fungsi pengembangan dan yang ke empat fungsi penunjang.

Dalam upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru untuk memperkuat individu dan masyarakat dalam masalah sosial. Menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi) dengan memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan yang lain.

Dalam berbagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia, pemerintah tidak bisa dan tidak mungkin mampu bertindak bekerja sendiri. Berbagai organisasi sosial-keagamaan perlu mendirikan berbagai pelayanan yang diperlukan. Dalam hal ini menurut Hadi Martono (2011:771) menjelaskan bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia sebagai berikut :

1. populasi lanjut usia adalah populasi yang rapuh akan kesehatan
2. jenis pelayanan yang dibutuhkan bervariasi tergantung dari faktor fisik psikis serta sosial ekonomi
3. pelayanan kesejahteraan sosial pada lanjut usia adalah pelayanan yang berkaitan dengan kesehatan, sosial, agama, serta ketrampilan

Kebutuhan lansia yang telah di atur dalam petunjuk pelaksanaan adalah terpenuhinya kebutuhan jasmani, seperti kebutuhan pokok sandang, pangan, kesehatan, pengisian waktu luang, kedua terpenuhinya kebutuhan rohaniah yang baik seperti kasih sayang dan juga peningkatan gairah hidup agar tidak khawatir menghadapi sisa hidupnya, selanjutnya yang ketiga adalah terpenuhinya kebutuhan sosial yang baik terutama

hubungan antara masyarakat dan teman sebaya (Argyo Demartoto, 2007:33).

Menurut Boedi Darmojo lanjut usia dapat mencapai kesejahteraan sosialnya apabila dapat terpenuhi segala kebutuhannya, antara lain:

1. Kebutuhan fisik-biologis, yang meliputi:

a) Kebutuhan makan dan minum sesuai ukuran dan gizi yang diperlukan bagi lanjut usia.

b) Kebutuhan sandang dan papan.

c) Kebutuhan pelayanan seksual

d) Kebutuhan pelayanan kesehatan, berkaitan dengan penyembuhan penyakit yang diderita lanjut usia.

2. Kebutuhan mental-psikologis, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan, misalnya kasih sayang, rasa tentram dan nyaman dari lingkungan fisik atau sosial yang dapat meresahkan jiwanya, dan kebutuhan rohani.

3. Kebutuhan sosial, yang menyangkut keinginan untuk bergaul dan mengaktualisasikan perasaan dan ide dalam dirinya, juga penghargaan dan pengakuan akan eksistensi dirinya, sosialisasi, komunikasi sosial.

4. Kebutuhan alat bantu, menyangkut pemaksimalan fungsi organ-organ tubuh yang karena usia telah mengalami penurunan, seperti

kaca mata, tongkat pembantu jalan, alat bantu dengar dan kursi roda (Tri Gutomo dkk, 2009: 22).

Setiap orang memiliki kebutuhan hidup. Orang lanjut usia juga memiliki kebutuhan hidup yang sama agar mencapai kesejahteraan. Selain kebutuhan akan makanan bergizi seimbang, pemeriksaan kesehatan secara rutin, perumahan yang sehat dan kondisi rumah yang tentram dan aman kebutuhan-kebutuhan sosial bagi lanjut usia sangatlah penting.

G. Definisi Konseptual

1. Organisasi Pemerintah Daerah

Organisasi Pemerintah Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2. Kinerja

Kinerja merupakan seperangkat hasil yang di capai oleh individu maupun kelompok individu serta merujuk pada tingkatan pencapaian serta pelaksanaan suatu pekerjaan yang memiliki tujuan serta kriteria tersendiri dalam mencapai hasil yang diinginkan.

3. Lansia

Lansia merupakan orang yang telah mencapai usia 60 tahun

4. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan kondisi atau keadaan seseorang yang makmur, sehat dan damai

5. Kesejahteraan Sosial Lansia

Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan yang ideal dalam tata kehidupan material maupun spiritual.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah petunjuk dan pelaksana yang menjelaskan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga penelitian ini lebih jelas dan terarah. Adapun indikator-indikator penelitian ini tentang Kinerja Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Pelaksanaan Program Meningkatkan Kesejahteraan Lansia Tahun 2016. Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul berorientasi pada hasil yang bermanfaat untuk kesejahteraan Lansia. Adapun hasilnya dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu:

1. Aspek Produktifitas

Efektifitas dan efisiensi pelayanan

2. Aspek Kualitas Pelayanan

Kepuasan lansia terhadap kualitas layanan

3. Aspek Responsibilitas

Kesesuaian program dengan kebijakan organisasi

4. Aspek Responsivitas

Mengenali keinginan dan kebutuhan masyarakat serta kemampuan memberikan solusi

5. Aspek akuntabilitas

Kesesuaian program terhadap nilai dan norma

I. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang (Nazir,1999:63). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki. Sehingga dapat menggambarkan secara sistematis mengenai suatu keadaan, situasi, dan fenomena, tentang Kinerja Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Pelaksanaan Program Meningkatkan Kesejahteraan Lansia.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul yang beralamatkan di Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

3. Unit Analisis

Guna mengetahui Kinerja Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Pelaksanaan Program Meningkatkan Kesejahteraan Lansia Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan sumber informasi yang dianggap faham dan dapat dipercaya yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Metode ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari observasi dan wawancara. Adapun informasi yang dijadikan unit analisa dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu individu atau perseorangan yang membutuhkan pengelolaan lebih lanjut seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Data primer yang digunakan penulis berupa tanya jawab langsung dengan pihak-pihak terkait Instrumen pengumpulan data primer diperoleh melalui observasi dan pengamatan langsung, dan juga wawancara dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, dimana data

tersebut diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan langsung dengan penelitian dan mampu memberikan informasi. Untuk mendapatkan data primer ini dilaksanakan dengan wawancara terhadap unit analisa yang dijadikan sebagai narasumber.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data sekunder yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan dengan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Diperoleh dari literatur-literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, penelitian perorangan terdahulu yang relevan dengan objek penelitian, website dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Adapun data-data yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) Data lansia tahun 2016 yang mendapatkan bantuan dari program ASLUT

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan informasi dalam menyelesaikan laporan ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara/*Interview*

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara atau bertanya langsung kepada responden guna mendapatkan informasi yang diperlukan secara langsung dengan responden ditempat penelitian. Menurut M.Natsir bahwa interview adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan responden

Adapun narasumber yang terkait adalah:

- 1) Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Perlindungan Anak dan Lanjut Usia Bapak Iryanta
- 2) Pendamping Program ASLUT Bapak Santoso
- 3) Objek program ASLUT
 - a. Painah
 - b. Kariyo Dikromo
- 4) Objek Program Pelatihan Lansia Potensial
 - a. Adi Legi
 - b. Legiyah

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan dan mempelajari dokumentasi dan prinsip-prinsip atau catatan, foto, table maupun peta, tempat dijadikan penelitian, dimana dengan dokumentasi yang ada dapat memberikan gambaran tentang keadaan daerah penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif teknik analisis data dilakukan pada saat terkumpulnya data berlangsung serta pada saat selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Kegiatan nya adalah mereduksi data data display dan conclusion drawing/verivication. Data yang diperoleh dilapangan kemudian diolah dengan lebih sederhana. Kegiatan analisis nya yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting menentukan tema dan polanya. Reduksi data kan mempermudah dan memperjelas dalam menentukan gambaran yang telah diperoleh dari data lapangan serta peneliti dapat mudah dalam melakukan pengumpulan data berikutnya. Peneliti juga dapat membedakan mana yang menjawab pertanyaan peneliti dengan mana yang tidak menjawab pertanyaan peneliti.

b. Penyajian data

Tahap selanjutnya setelah reduksi data adalah men display kan data atau penyajian data atau meringkas data agar lebih mudah dipahami dengan apa yang terjadi di lapangan dan dapat merencanakan kerja selanjutnya berrpedoman dengan apa yang sudah ipahami (Sugiyono, 2009:247).

a. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya setelah peneliti melakukan penyajian data adalah peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang awal masih belum bersifat permanen masih bisa berubah-ubah bila tidak ada bukti yang kuat yang mendukung pada tahap selanjutnya. Kesimpulan pada penelitian kualitatif akan dapat menjawab rumusan masala, rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada.

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.